

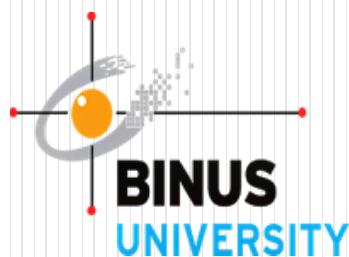
Indonesia Development Forum 2017

Fighting Inequality for Better Growth

Jakarta, 9-10 August 2017

Strategi Percepatan Tingkat Literasi Keuangan Sebagai Sebuah Perangkat Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Industri Keuangan yang Inklusif

Studi Perbandingan Singkat antara Indonesia, Brazil , Australia dan Singapura



Strategi Percepatan Tingkat Literasi Keuangan Sebagai Sebuah Perangkat Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Industri Keuangan yang Inklusif

Studi Perbandingan Singkat antara Indonesia, Brazil , Australia dan Singapura

Ubaidillah Nugraha

Universitas Indonesia/Universitas Bina Nusantara/HSBC Bank

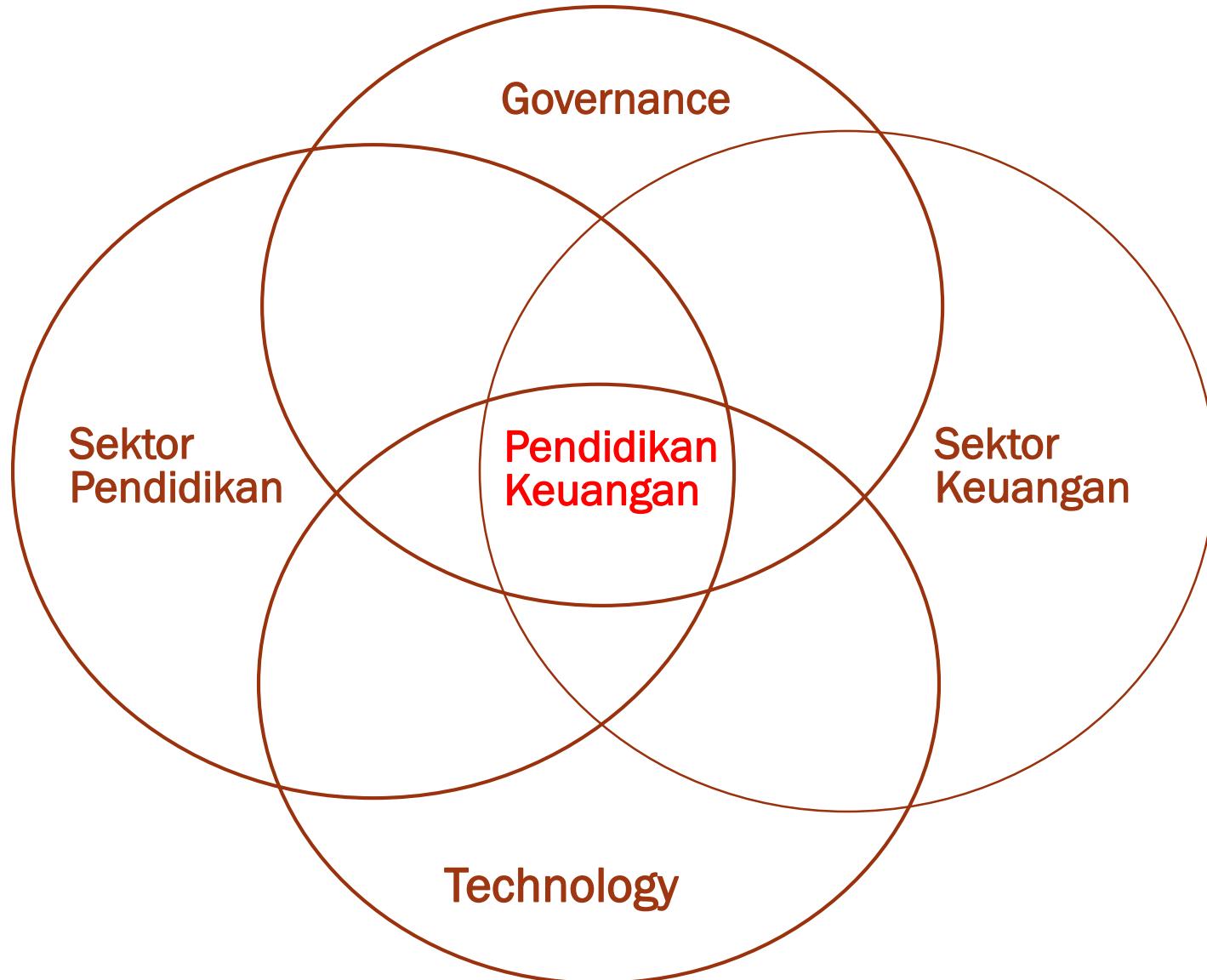
Indonesia Development Forum

Jakarta, 9-10 Agustus 2017

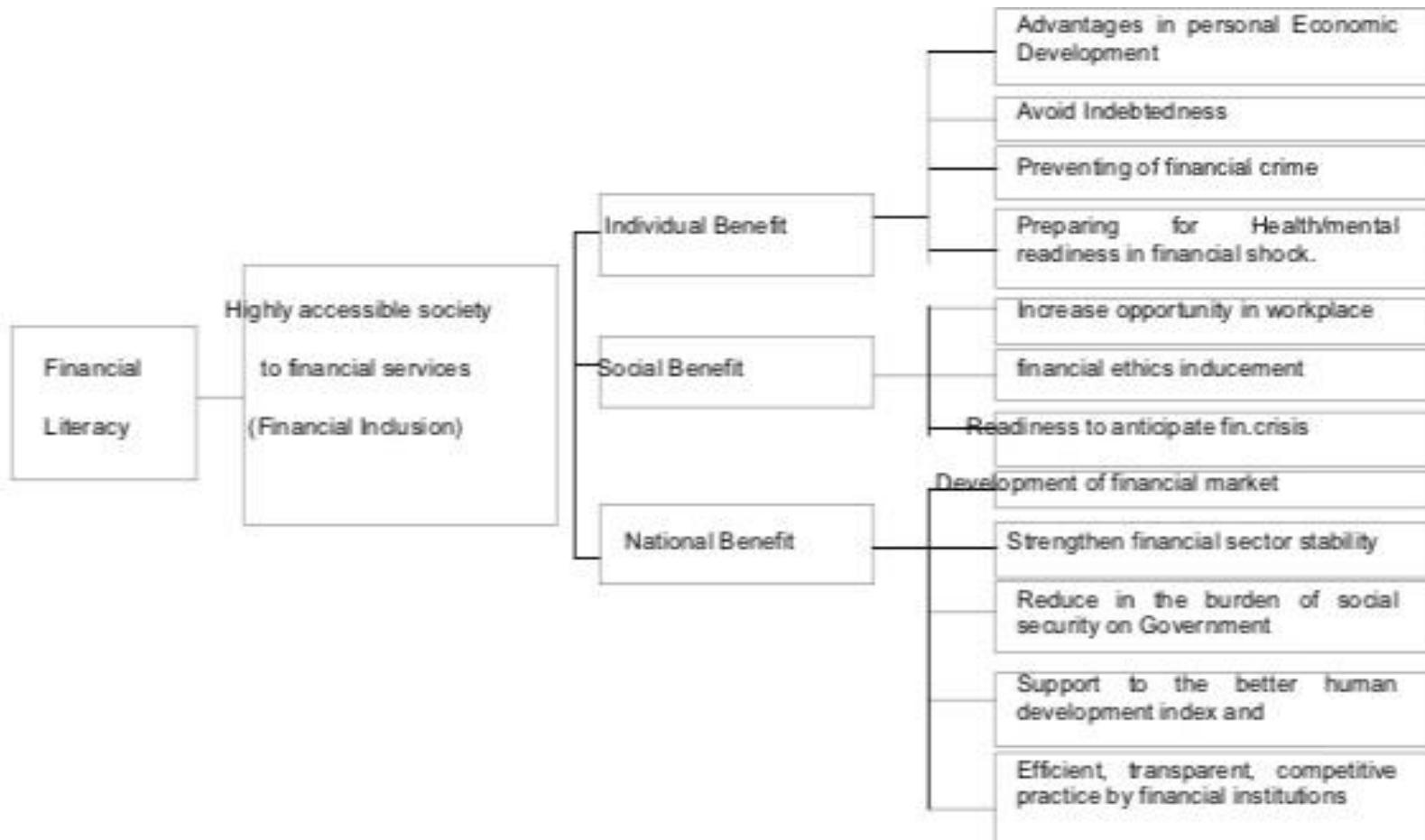
Latar Belakang

- **Adanya Paradox antara pertumbuhan ekonomi dan Kapasitas Manusia.** Di tengah naiknya peringkat GDP yang sudah masuk kategori G20 terdapat situasi paradoks dimana seiring dengan kemajuan ekonomi, ranking pengembangan kapasitas manusia baik *human development index* (HDI) maupun *inequality adjusted human development index* justru mengalami stagnasi dari waktu ke waktu (ranking di atas 100 sejak tahun 2000 untuk kedua indikator tersebut). Ranking pengembangan manusia tergambar dalam *HDI* ataupun *inequality adjusted HDI* yang dikeluarkan oleh UNDP yang bertujuan merubah orientasi fokus pembangunan dari semata kebijakan pertumbuhan ekonomi kepada kebijakan pembangunan manusia
- Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir telah kehilangan momentum menjadi negara maju (*developed country*) dari kesempatan *oil boom* di tahun 70an dan keajaiban asia (*Asia's miracle*) di era 90an dikarenakan oleh tata kelola dan korupsi serta ketidaksiapan menghadapi krisis keuangan. **Era 2015-2030 akan menjadi kesempatan ketiga Indonesia dengan adanya dividen demografis yang mana penduduk muda akan menjadi subyek momentum ini**
- Salah satu indikator yang mempengaruhi ranking tersebut adalah **akses kepada pendidikan dan tingkat literasi**. Salah satu unsur dari literasi adalah **literasi keuangan** yang akan menjadi perhatian sentral dalam paper ini.

Kebijakan yang Terkait



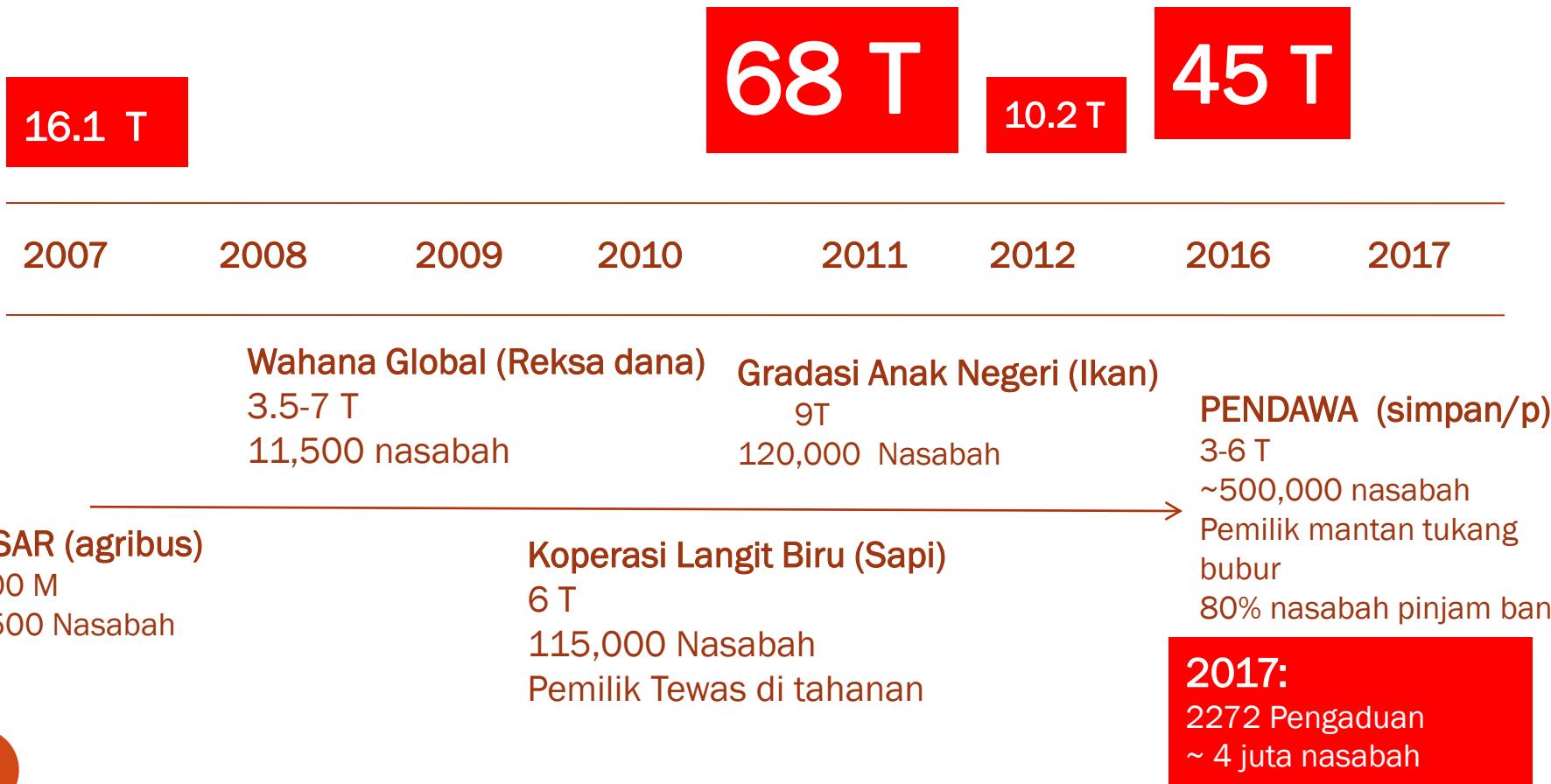
Manfaat Pendidikan Keuangan (PK) pada Sektor Keuangan Inklusif



Sumber: OECD, Jariwala and Sharma,(2011,)

Pendidikan Keuangan Harganya “Sangat Mahal” jika diabaikan

Kerugian dari investasi “Bodong”



Kebijakan Pendidikan Keuangan (*financial literacy*)

Kompleksitas Industri yang semakin tinggi dan **Krisis keuangan yang intervalnya semakin pendek** dari waktu ke waktu telah memaksa pemerintah di berbagai negara untuk melakukan penelaahan kembali berbagai kebijakan yang ada di sektor keuangan. Selama ini sebagian besar negara memfokuskan kepada “**sisi penawaran (supply side)**” dari kebijakan yang mana penekanannya adalah pada perbaikan peraturan dan struktur organisasi, tata kelola (**governance**), pengawasan yang hati-hati dan penindakan hukum ketimbang “**sisi permintaan (demand side)**” yang mana fokusnya lebih kepada kemampuan warga negara untuk memperkuat dirinya sendiri dari ancaman krisis (Jariwarla and Sharma, 2011).

Di dalam beberapa tahun belakangan, literasi keuangan telah memainkan peranan penting dalam reformasi keuangan global dan menjadi salah satu perangkat kunci kebijakan sektor keuangan di dunia (Zia and Xu, 2012). Didukung oleh OECD yang telah membangun policy network yang berfokus pada *financial education* yang sampai saat ini telah melibatkan lebih dari 40 negara dan telah mendesak agenda ini menjadi prioritas dalam agenda global.

Mengapa Brazil, Australia dan Singapura?

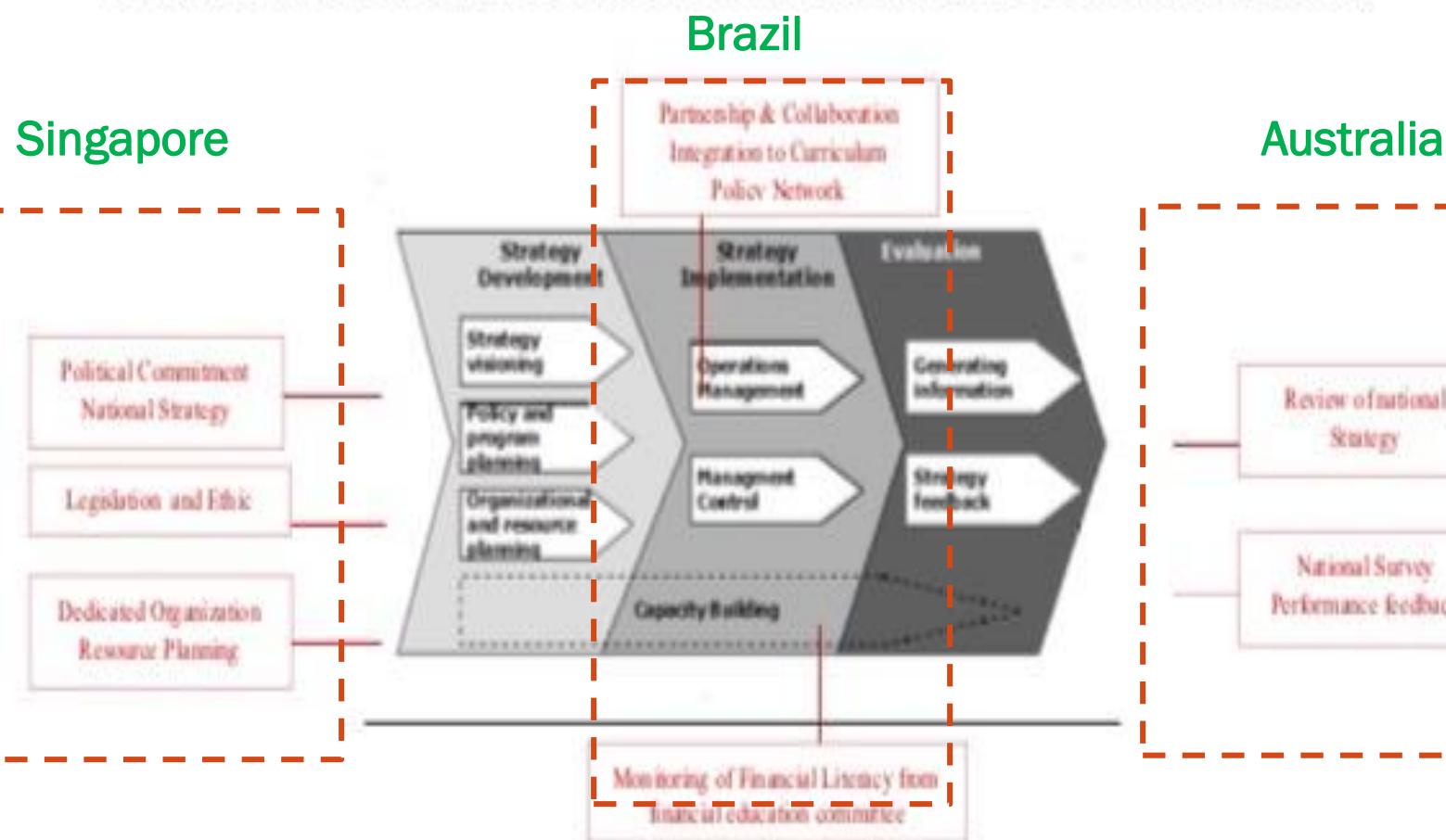
Best practice and lesson learned

Key Indicators	Indonesia	Australia	Brazil	Singapura
GDP Ranking	16	12	9	37
GDP/Capita (US Dollar)	3,236	51,593	8,587	53,053
GDP/Cap Ranking	115	12	72	10
Human Development Index (HDI) Ranking	110 90	2 13	75 79	10 7
Corruption Perception Index				
% of population who has Bank Account	20%	99%	56%	98%
Adult literacy	92.6%	100%	90.3%	96.1%
% of population completed Secondary School	41.4%	92.2%	49.5%	75%
Financial Literacy Ranking (Visa International)	27	3	1	N/A

(Sumber: UNDP 2015, World Bank, World Data Atlass 2016, Visa International, Transparansi Internasional, Learning Curve report 2014)

Policy Policy Process

Diagram 2: A functional View of The Public Management Process : Financial Literacy



(Barzelay and Cortázar (2004), chapter 3 of "Innovation in Governance & Public Administration: Replicating what works").

10 tantangan dan *feedback* Kunci dari perbandingan

1. Perlunya **komitmen politik** yang kuat dari otoritas tertinggi dalam mengkampanyekan strategi literasi keuangan yang menyeluruh. ([Jokowi langsung, Menteri Keuangan/Pendidikan/OJK atau belum ada?](#))
2. **Kolaborasi** antara sesama stakeholder dalam pendidikan keuangan (Otoritas Keuangan, Sektor Swasta, Sektor Pendidikan, Media dan aparat penegak hukum). Komprehensive atau topikal ([satgas pengawasan investasi](#))
3. Pentingnya memiliki **target yang jelas dan organisasi yang khusus** menjalankannya dengan struktur dan program yang berkesinambungan. [Saat ini satu unit dibawah OJK, ke depan ?](#)
4. **Integrasi** pendidikan keuangan ke **dalam kurikulum pendidikan** secara keseluruhan . [Sampai dengan level pendidikan apa? Materinya apa?](#)
5. Mensikapi situasi Oxymoron dalam integritas sektor keuangan sehingga dirasa penting induksi dari etika dan integrity melalui literasi keuangan .
6. **Platform digital** yang menjadi perangkat (*tool*) utama dalam literasi keuangan.
7. **Segmentasi** pendekatan pendidikan keuangan kepada beragam industri (**no one fit for all**)
8. **Berbagi tanggung jawab** dengan pelaku pasar dalam rangka mendidik masyarakat dengan langkah persuasif dan dalam kerangka menumbuhkan pasar.
9. Melibatkan diri pada Kerjasama Internasional (**Policy Network**)

Kesimpulan

- Saat ini Indonesia kembali masuk ke dalam radar komunitas internasional sebagai salah satu negara yang paling menjanjikan di abad 21 baik dari kiprah dalam perekonomian dunia (**G20**), **masuk ke radar investasi (Investment grade) dan potensi bonus demografi**. Akan tetapi, hal yang tidak bisa ditunda adalah mempersempit **gap pembangunan manusia** dengan negara-negara lain. Beragam inisiatif telah dilakukan dalam mengembangkan kapabilitas manusia Indonesia salah satunya adalah pendidikan keuangan.
- Salah satu tantangan besar dalam mewujudkan pertumbuhan sektor keuangan yang inklusif adalah peningkatan literasi keuangan. **Rendahnya literasi keuangan memiliki dampak destruktif yang signifikan kepada perekonomian secara keseluruhan**. Momentum pembentukan OJK yang menjadikan literasi keuangan berada pada satu payung koordinasi adalah kesempatan besar yang dapat menunjang kepada tercapainya agenda-agenda di atas dan membangun fondasi yang kuat ke depannya.
- Ke depannya, berdasarkan framework *functional view of public management* **berbagai inisiatif lanjutan** dapat dikembangkan untuk mempercepat peningkatan literasi keuangan. Selain komitmen politik yang lebih besar, juga memperluas cakupan target pendidikan, perhatian khusus pada kaum muda dan pemanfaatan (*leverage*) platform digital dalam menggulirkan beragam inisiatifnya. Di samping itu juga perlu dipertimbangkan segmentasi pendidikan keuangan berdasarkan jenis sub-industri di dalam industri keuangan itu sendiri (perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pegadaian, modal ventra dan lain sebagainya), pembentukan organisasi khusus yang menangani pendidikan keuangan ataupun perlindungan konsumen perlu untuk dikaji kelayakannya (seperti APRA di Australia). Dan juga inovasi-inovasi yang lebih memudahkan target pendidikan untuk ikut dan menikmati proses yang ada (seperti *financial soccer* di Brazil, Indonesia dapat melakukan inovasi yang cocok untuk karakteristik masyarakatnya).

Terima kasih

Sejarah dan Evolusi Sektor Keuangan (1966-2016)

- **Formative (1966-1972)** ditandai dengan kegiatan sektor keuangan yang sebagian besar mendukung manajemen bantuan luar negri dimana pada saat itu ekonomi masih tergantung pada bantuan keuangan organisasi internasional dan negara-negara maju. Sementara periode
- **Oil Bonanza (1973-1982.)** telah banyak mempengaruhi sektor keuangan saat itu yang mana kebijakan moneter ditandai dengan provisi likuiditas kredit Bank Indonesia yang didukung oleh *oil boom* (Binhadi, 1995). Pemerintah juga mulai mengembangkan lansekap industri keuangan dengan pengembangan pasar modal.
- **Reformasi (1983-1991)** yang mana shock harga minyak di awal tahun 90an telah memaksa Indonesia untuk memikirkan kembali kebijakan ekonomi dan keuangannya sepanjang tahun 80an dan awal 90an. Liberalisasi keuangan (*Financial liberalization*) dilakukan dengan pendekatan pasar dan mengurangi peran dan beban dari negara (Wardhana, 1995).
- **Ekspansi: (1992-1997)** Respon positif dari pihak swasta telah menstimulasi relaksasi dari beragam peraturan untuk memberikan insentif dan mengurangi halangan untuk masuk. Pemerintah mengeluarkan serial kebijakan yang melepaskan hambatan dan menciptakan lingkungan yang bersahabat dalam menjalankan bisnis perbankan, akan tetapi di saat yang bersamaan memberikan konsekuensi kepada risiko yang mulai muncul terhadap industri keuangan secara keseluruhan yang puncaknya adalah krisis keuangan 1997.
- **Restrukturisasi: (1998-2008)** Indonesia adalah salah satu negara yang terhantam krisis paling dalam (Hill, 2000). Beberapa pengamat menggunakan istilah “matinya macan Asia” untuk menggambarkan bencana yang dialami masyarakat Indonesia saat itu. Menyusul krisis, Indonesia telah memperkuat fungsi pengawasan dan meminta institusi keuangan untuk memperkuat struktur permodalan untuk mencegah potensi hantaman krisis berikutnya. Wacana untuk perlunya memiliki fungsi pengawasan yang terpisah dari Bank Indonesia mulai dimunculkan
- **Inklusi (2009-saat ini)** Saat ini, sektor keuangan berhadapan dengan tantangan ketimpangan dalam masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari industri tersebut. Satu dari beberapa faktor penting adalah masih minimnya keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dari berbagai latar belakang baik sosial, ekonomi, gender dan keyakinan ke dalam sistem keuangan secara keseluruhan.

Short Bios

Ubaidillah Nugraha is currently a Doctoral student at the Faculty of Administrative Science (University of Indonesia), lecturer at the undergraduate and postgraduate program (Bina Nusantara University) dan Independent Committe Member for HSBC Bank. He was previously Managing Director for Trimegah Securities Tbk and Vice President for Bank Mandiri Tbk. He graduated from University of Indonesia, Faculty of Economics and earned his postgraduate degree in Public Management from School of Government, Victoria University, New Zealand.

Previous papers:

- | | | |
|------|--|--------------------|
| 2016 | 6th International of Journal of Anthropology Indonesia

Paper: <i>“A Necessary Given” or “Social Illness” in Society,
Public Policy Perpective on Inequality</i> | Jakarta, Indonesia |
| 2014 | 11th Northeastern Conference on Indonesia, Yale University

Paper: <i>Strategic Management in Government</i> | New Haven, USA |
| 2013 | CFO Conference: Current landscape of Regional Fin.Market

Topic: <i>The Role of CFO in the Indonesian growing market</i> | Singapore |
| 2011 | International Conference on Financial Engineering & Risk Mgt.

Joint event by SBM ITB, LSE & University of Columbia, USA

Paper: <i>Quantitative and High Speed Trading in Indonesian Capital Market</i> | Bandung |

Ponzi Scheme

Wanted: More Dupes. Lots More.

As they unfold, Ponzi schemes ultimately require an unsustainably large pool of investors to keep the racket going.

In this simplified example, the schemer starts by taking \$100 from investors, promising to double it within a month. But instead of investing their money, he pays them with funds from larger, successive rounds of investors.

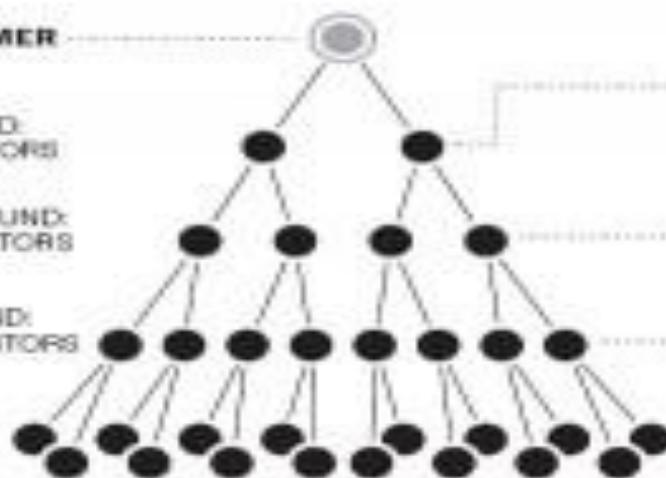
THE SCHEMER

FIRST ROUND:
TWO INVESTORS

SECOND ROUND:
FOUR INVESTORS

THIRD ROUND:
EIGHT INVESTORS

NEXT: 16
INVESTORS

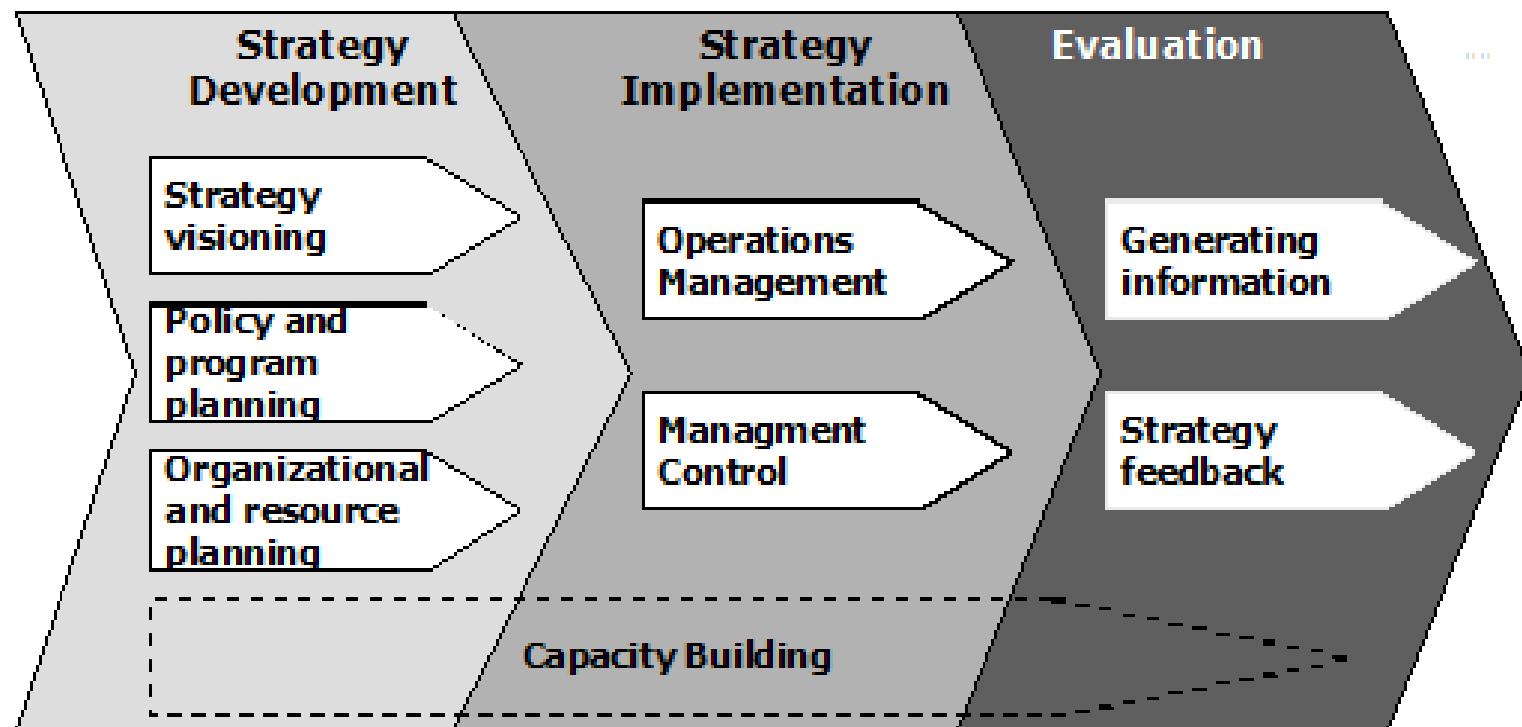


- 1 In the first month, the schemer takes \$100 each from the first two investors.
- 2 Because the schemer pockets the \$200, he needs to find \$400 — **four investors** — in the second month to pay the returns promised.
- 3 In the third month, he owes \$800, so he has to find **eight new investors**. He'll have to get more than \$100 from each of them if he wants to keep skimming money for himself.
- 4 In the next month, he'll need 16 investors. And so on.
- 5 By the 10th round, he'll need to find a new group of 1,024 investors. By the 18th round, he would have to come up with over a **quarter of a million investors**.

THE NEW YORK TIMES

Public Policy Framework

Cortazar dan Barzelay (*Innovation in governance and public administration; replicating what works*) mengajukan kerangka kebijakan “**Strategic functional point of view in public management process**” yang terdiri dari pengembangan strategi (*strategy development*), implementasi strategi (*strategy implementation*) dan evaluasi untuk memastikan terjadinya kesinambungan .



1. Pengembangan Strategi (*Strategy Development*)

1. Visi, Komitmen Politik dan dukungan legislasi (Singapura)

Pertemuan pemimpin-pemimpin negara dalam pertemuan tingkat tinggi G20 tahun 2012 di Rusia telah mengagendakan *Financial Education* sebagai salah satu fokus utama Krisis keuangan global telah memberikan pesan terhadap pentingnya hubungan antara sektor keuangan, komitmen politik, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, adalah sosok yang memimpin langsung inisiatif pendidikan keuangan. Beliau menekankan bahwa warga Singapura perlu berpengetahuan dan berdaya tahan tinggi terhadap krisis. Regulasi-regulasi itu tidak saja mewajibkan pendidikan keuangan yang cukup tetapi juga melindungi warga jika terdapat pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam pelayanan keuangan.

2. Strategi Nasional Literasi keuangan/Roadmap (Australia)

Strategi Nasional penting untuk menetapkan arah jangka panjang dari kampanye literasi keuangan yang dilakukan dengan mengantisipasi beberapa perubahan lingkungan yang terjadi baik dari segi perubahan demografis, inovasi produk dan lain sebagainya. Telah terdapat 34 negara (OECD, 2015) yang telah mengimplementasikan strategi literasi keuangan. Indonesia belum lama telah menjadi salah satu diantaranya.. Australia adalah satu diantara negara paling awal yang telah memiliki strategi secara komprehensif yang kemudian diikuti oleh negara lain dengan menggunakan *local wisdomnya* masing-masing.

3. Kelengkapan Organisasi dan Perencanaan Sumber Daya Manusia (Australia dan Singapura)

Pentingnya organisasi yang secara khusus menangani pendidikan keuangan sangat dibutuhkan untuk memenuhi harapan dari *stakeholder*. Australia menjadi salah satu negara pertama yang menediakan dukungan literasi keuangan dengan membentuk *Commission of Financial Literacy and Retirement Income*, sebuah bentuk keseriusan yang menjadikannya acuan bagi negara lain (Crosan, 2010). Sementara itu di Singapura, inisiatif dilakukan oleh *Money Sense*, sebuah organisasi di bidang literasi keuangan berskala nasional dan dimonitor secara langsung oleh financial education steering committee.

2. Implementasi Strategi

1. Partnership and collaboration (Brazil)

Kolaborasi yang menyeluruh diantara stakeholder dalam literasi keuangan menjadi salah satu keberhasilan Brazil dalam meningkatkan indeks literasi keuangannya. Di negara tersebut, fondasi kolaborasi dimulai dengan pembentukan *Committee of Financial Systems, Capital Markets, Private Insurance and Social* (COREMEC). Literasi keuangan menjadi topik utama yang diterjemahkan dengan pembentukan *National Committee for Financial Education* (CONEF). Kolaborasi dengan sektor swasta juga sangat strategis dengan pembentukan *National Association for Financial Education* (NAFE).

2. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Formal dan Inovasi (Brazil dan Australia)

Masyarakat perlu dididik tentang persoalan keuangan sedini mungkin. Alan Greenspan, mantan Gubernur Bank Sentral Amerika menyebut anak-anak di sekolah dasar sudah perlu diberikan informasi awal yang cukup mengenai keuangan. Australia telah menempatkan kurikulum yang terintegrasi dari usia dini (TK) dengan integrasi mata pelajaran keuangan dan yang lainnya (matematika, humanity dan kewarganegaraan). Brazil memperkenalkan beragam inovasi (contoh:*financial soccer*) sebagai media pembelajaran yang efektif bagi penduduknya. Investimento, sebuah perusahaan asset management berbasis online telah berhasil menguasai pangsa pasar terbesar melalui *education based sales model* dimana KPI utama perusahaan tersebut adalah banyaknya kelas pendidikan yang diadakan untuk calon nasabah

3. Monitoring dan Feedback (Australia)

Ada beragam bentuk evaluasi yang dapat dilakukan termasuk di dalamnya meta-evaluation, internal, external, ex-ante, ex-post, rigorous, best practice (Wollmann, 2003). Makalah ini mengusulkan proses monitoring dilakukan berfokus pada internal dan melalui proses self-evaluation yang dilakukan oleh reviewer independen yang mengacu kepada *best practice* Australia secara periodik melakukan review kepada strategi nasional mereka dan melaporkannya kepada pemerintah. Pada waktu waktu tertentu dilakukan survey untuk memperoleh feedback atas proses yang telah dilakukan selama ini.